



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

13 - 14 Juli 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Rabu, 13 Juli 2022 https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-salurkan-pembiayaan-3220-unit-rumah-skema-flpp-per-juni-nilainya-rp-469-miliar BSI Salurkan Pembiayaan 3.220 Unit Rumah Skema FLPP Per Juni, Nilainya Rp 469 Miliar SEVP Consumer Banking BSI Wawan Setiawan BSI mencatat telah menyalurkan pembiayaan untuk 3.220 unit rumah FLPP sampai dengan 30 Juni 2022. Nilai penyaluran sebesar Rp 469 miliar per Juni 2022. Total realisasi penyaluran FLPP sejak 2012 sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp 6,23 triliun atau 50.462 unit rumah.	+
2.	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Rabu, 13 Juli 2022 https://bisnis.tempo.co/read/1611749/pii-berikan-penjaminan-ke-42-proyek-infrastruktur-senilai-rp-476-triliun PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun Direktur Utama PII M Wahid Sutopo PT <u>Penjaminan</u> Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi sebesar Rp 476 triliun. Dari 42 proyek tersebut, ada 31 proyek di antaranya yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai <u>investasi</u> mencapai Rp 463 triliun. Sedangkan sisanya, 11 proyek menggunakan skema Non KPBU.	+
3	TANGGAL MEDIA	Rabu, 13 Juli 2022 https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6177707/catatan-bpk-ke-pupr-aset-tak-jelas-hingga-lebih-bayar-proyek	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 07 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

JUDUL	Catatan BPK ke PUPR: Aset Tak Jelas hingga Lebih Bayar Proyek	
NARASUMBER	Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh	
RESUME	BPK mengungkap permasalahan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021. Di antaranya terkait belanja modal dan belanja barang. BPK mengungkapkan kelebihan bayar yang disebabkan oleh kekurangan volume fisik, kesalahan perhitungan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, duplikasi sistem pembayaran pekerjaan. Pada sisi pengamanan aset tetap, BPK mengungkapkan permasalahan seperti aset tetap tidak diketahui keberadaannya, belum dilengkapi dokumen kepemilikan, dikuasai/dimanfaatkan pihak lain dan bukti kepemilikan aset berupa jalan atas nama pemerintah daerah.	



13 / 07 / 2022

Sumber: kontan.co.id

BSI Salurkan Pembiayaan 3.220 Unit Rumah Skema FLPP Per Juni, Nilainya Rp 469 Miliar

Reporter: Maizal Walfajri
Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk konsisten mendorong program membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah sesuai prinsip syariah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BSI mencatat telah menyalurkan pembiayaan untuk 3.220 unit rumah FLPP sampai dengan 30 Juni 2022. Nilai penyaluran sebesar Rp 469 miliar per Juni 2022.

"Total realisasi penyaluran FLPP sejak 2012 sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp 6,23 triliun atau 50.462 unit rumah," tutur SEVP Consumer Banking BSI Wawan Setiawan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7).

BSI memang tengah memacu pertumbuhan bisnis griya, dengan memanfaatkan momentum tahun pemulihan ekonomi 2022. Salah satunya melalui program FLPP. Saat ini, BSI secara umum telah bekerja sama dengan 1.915 pengembang dan terlibat dalam 2.554 proyek.

Selain itu, BSI mendorong penguatan kerja sama dengan developer atau pengembangan. BSI memberikan apresiasi kepada rekanan pengembang terbaik yang memberikan referral nasabah tertinggi.

Direktur Manajemen Risiko BSI Tiwul Widyastuti, mengatakan BSI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak.

"Strategi BSI untuk mendorong penyaluran program KPR Sejahtera FLPP di antaranya melalui upaya digitalisasi dan mengoptimalkan market share serta database nasabah existing. Selain itu, melalui apresiasi ini membangun dan menguatkan sinergi dengan developer terbaik dari setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tiwul.

Apresiasi tersebut berupa logam mulia yang diberikan kepada empat developer, yaitu PT Bangun Famili Sejahtera, PT Siger Grup, CV Anugerah Abadi & Co, serta PT Mahan Nata Nusantara.

"Sehingga dengan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peran aktif developer untuk dapat meningkatkan kontribusi penyaluran rumah subsidi atau FLPP melalui Bank Syariah Indonesia," imbuhnya.

Wawan menambahkan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Akad Massal yang sebelumnya telah diselenggarakan perseroan pada 22 Juni 2022 secara hybrid.



13 / 07 / 2022

Sumber: kontan.co.id

Pada kegiatan tersebut telah dilakukan akad bersama 2.500 nasabah yang tersebar di 21 provinsi, 10 Region Office, dan 60 Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Menurut Wawan, melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya golongan MBR yang terlayani dan mendapatkan pembiayaan BSI KPR Sejahtera FLPP.

Sementara itu, optimisme manajemen BSI dalam mengoptimalkan pangsa pasar FLPP melalui KPR Sejahtera sangat beralasan. Menurut data perseroan, BSI akan memanfaatkan peluang di mana target

jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan terus ditingkatkan.

Dari 55.000 unit pada 2022, menjadi 70.000 unit tahun depan dan 88.845 unit pada 2024. Pun demikian target pembangunan rumah swadaya bagi MBR akan pula dikontrol. Dari 118.960 unit pada 2022, menjadi 177.925 unit pada 2023, dan 205.225 unit pada 2024.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-salurkan-pembiayaan-3220-unit-rumah-skema-flpp-per-juni-nilainya-rp-469-miliar>



13 / 07 / 2022

Sumber: tempo.co

PII Berikan Penjaminan ke 42 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 476 Triliun

Reporter: Hamdan Cholifudin Ismail

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

TEMPO.CO, Jakarta - PT **Penjaminan** Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah memberikan penjaminan kepada 42 proyek investasi dengan total nilai investasi sebesar Rp 476 triliun.

"Proyek yang mendapatkan penjaminan dari PIP terutama proyek-proyek **infrastruktur** jadi kelihatan fisiknya," ujar Direktur Utama PII M Wahid Sutopo, Rabu, 13 Juli 2022.

Dari 42 proyek tersebut, ada 31 proyek di antaranya yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai **investasi** mencapai Rp 463 triliun. Sedangkan sisanya, 11 proyek menggunakan skema Non KPBU.

Wahid menjelaskan sebanyak 42 proyek itu mencakup enam sektor yaitu pariwisata, ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, transportasi dan jalan tol yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut rincian sebagian dari 42 proyek tersebut beserta nilai investasinya:

1. Jalan Lintas Timur Riau Rp 0,53 triliun
2. SPAM Pekanbaru Rp 0,5 triliun
3. Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan Rp 1 triliun
4. SPAM Bandar Lampung Rp 0,8 triliun

5. Tol Serang Panimbang Rp 8,6 triliun
6. Tol Japek II elevated Rp 16,2 triliun
7. SPAM regional Jatiluhur Rp 1,68 triliun
8. Tol Japek II Selatan Rp 14,7 triliun
9. Tol Gedebage Tasik Cilacap Rp 56,2 triliun
10. SPAM Karian Serpong Rp 2,43 triliun
11. Tol Cisumdawu Rp 8,4 triliun
12. Tol Krian Bunder Rp 12,9 triliun
13. Tol Semarang Demak Rp 5,4 triliun
14. PLTP Dieng II dan Patuha II Rp 6,9 triliun
15. Jembatan Callender Hamilton Rp 2,19 triliun
16. SPAM Umbulan Rp 2,1 triliun
17. Tol Probowangi Rp 23,4 triliun
18. Tol Batang Semarang Rp 14 triliun
19. PLTU Batang Rp 61,5 triliun
20. SPAM Semarang Barat Rp 0,4 triliun
21. Sreap Western and Central Java Rp 41,4 triliun
22. Pengembangan Jaringan Distribusi Jawa-Bali Rp 16,9 triliun
23. Tol Pandaan Malang Rp 6,4 triliun
24. Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo Rp 28,6 triliun
25. Tol Yogyakarta Bawen Rp 14,3 triliun
26. Bandara Labuan Bajo Rp 1,2 triliun
27. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Rp 4,6 triliun
28. Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Rp 24,6 triliun



13 / 07 / 2022

Sumber: tempo.co

29. Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara Rp 20,7 triliun
30. Palapa Ring Paket Barat Rp 1,2 triliun
31. Tol Balikpapan Samarinda Rp 11,9 triliun
32. Hydropower Programme Rp 6,6 triliun
33. Kereta Api Makassar Parepare Rp 1 triliun
34. Tol Manado Bitung Rp 4,9 triliun
35. Palapa Ring Paket Tengah Rp 1,1 triliun
36. Satelit Multifungsi Pemerintah Rp 6,4 triliun
37. Palapa Ring Paket Timur Rp 5,1 triliun
38. Pengembangan Jaringan Distribusi Kalimantan Maluku Papua Rp 29,9 triliun

Direktur Keuangan PII Donny Hamdani menyatakan penjaminan kredit muncul atas respon kebutuhan akibat dampak pandemi Covid-19. Penjaminan ini diberikan lantaran BUMN menjalankan sejumlah proyek yang ditugaskan pemerintah.

"Ini disebut penjaminan kredit juga atau obligasi, tapi untuk BUMN yang terdampak pandemi maupun yang memperoleh penugasan pemerintah," kata Donny menjelaskan lebih jauh tentang pemberian jaminan yang dilakukan oleh PII.

<https://bisnis.tempo.co/read/1611749/pii-berikan-penjaminan-ke-42-proyek-infrastruktur-senilai-rp-476-triliun>



13 / 07 / 2022

Sumber: detik.com

Catatan BPK ke PUPR: Aset Tak Jelas hingga Lebih Bayar Proyek

Author: Ilyas Fadilah

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2021.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh dan diterima oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada hari ini (13/07).

Dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2022), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada PUPR Tahun 2021.

Namun BPK mengungkap permasalahan keuangan Kementerian PUPR Tahun 2021. Di antaranya terkait belanja modal dan belanja barang.

BPK mengungkapkan kelebihan bayar yang disebabkan oleh kekurangan volume fisik, kesalahan perhitungan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, duplikasi sistem pembayaran pekerjaan.

Pada sisi pengamanan aset tetap, BPK mengungkapkan permasalahan seperti aset tetap tidak diketahui keberadaannya, belum dilengkapi dokumen kepemilikan, dikuasai/dimanfaatkan pihak lain dan bukti kepemilikan aset berupa jalan atas nama pemerintah daerah.

Dari pemeriksaan laporan keuangan belanja subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan Tahun 2021, BPK mengungkapkan permasalahan pembayaran subsidi selisih bunga kepada debitur KPR bersubsidi yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur.

Dan, potensi dendanya belum dipungut serta pembayaran kepada debitur yang sama pada Subsidi Selisih Bunga atas debitur KPR bersubsidi.

Pada kesempatan tersebut, Haerul menyampaikan pentingnya tindak lanjut seperti diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL).



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

13 / 07 / 2022

| Sumber: detik.com

"Kami mengingatkan kembali kepada Sekjen dan Irjen Kementerian PUPR untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal agar LHP dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara," pungkas Haerul.

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6177707/catatan-bpk-ke-pupr-aset-tak-jelas-hingga-lebih-bayar-proyek>